Resume Mata Kuliah Hukum Tata Negara

NAMA : Fadillah Nurul Utami

NIM : 10200120172

Pembahasan

1. Istilah Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara terdiri atas beberapa istilah, yaitu :

1. State Law, yaitu dimana yang diutamakan adalah hukum Negara.
2. State Recht, yang terbagi atas 2 bagian, yaitu Staat Recht in Ruinenzin (Dalam Arti Luas) dan Staat Recht in Engezin (Dalam Arti Sempit).
3. Constitutional law, yaitu dimana Hukum Tata Negara lebih menitikberatkan pada konstitusi atau hukum konstitusi.
4. Droit Constitutional, yang dimana titik tolaknya yaitu untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi.
5. Adapun istilah selanjutnya, yaitu Verfassungrecht.

2. Pengertian Hukum Tata Negara

Pengertian Hukum Tata Negara itu sendiri telah banyak di definisikan oleh para ahli hukum, adapun beberapa di antaranya :

1. J. R. Stellinga

Menurut J. R. Stellinga, Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara.

2. Van der Pot

Menurut Van der Pot, Hukum Tata Negara merupakan aturan dari yang menentukan berat badan yang diperlukan, kewenangan masing-masing lembaga, hubungan antar lembaga dengan satu sama lain, dan hubungan antara tubuh individu dalam suatu negara.

3. Paul Scholten

Menurut Paul Scholten, Hukum Tata Negara itu tidak lain adalah het recht dat regelt de staatsorganisatie atau hukum yang mengatur tata organisasi negara. Scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara dari organisasi non-organisasi, seperti gereja dan lainnya.

4. Van Vollenhoven

Menurut Van Vollenhoven, Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur semua masyarakat hukum baik yang atasan maupun bawahan menurut tingkatan dan wilayah yang menjadi lingkungannya masing-masing.

Adapun pengertian Hukum Tata Negara secara umum, yaitu Hukum Tata Negara merupakan bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antar berbagai lembaga dalam suatu negara, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.

3. Ruang Lingkup Kajian Hukum Tata Negara

Ruang Lingkup Kajian Hukum Tata Negara itu sendiri meliputi berbagai aspek, mengenai organisasi negara yang mencakup lembaga-lembaga negara, hubungan satu dengan yang lainnya, dan juga kekuasaannya. Selain itu, Hukum Tata Negara juga mencakup mengenai warga negara termasuk Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut dengan HAM, dan wilayah negara.

4. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu lainnya

1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik, Setiap Undang-Undang disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, sehingga dapat kita katakan bahwa setiap undang-undang merupakan hasil dari keputusan politik. Sedangkan Hukum Tata Negara melihat undang-undang sebagai produk hukum yang dibuat oleh alat-alat perlengkapan negara yang diberi kewenangan melalui prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara.

2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya, yang dimana Ilmu Negara memberikan dasar-dasar teoritis kepada Hukum Tata Negara, sedangkan Hukum Tata Negara merupakan bentuk konkretisasi dari teori-teori Ilmu Negara.

3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara, yaitu Hukum Administrasi Negara meliputi semua aturan hukum yang bersifat teknis (negara dalam keadaan bergerak), hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Kesamaan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara terletak dalam hal kebijakan pemerintah.

5. Pengertian Sumber Hukum

Pengertian Sumber Hukum telah banyak di definisikan oleh para ahli hukum, berikut beberapa di antaranya :

1. Menurut Zevenbergen, sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum.
2. Menurut C.S.T Kansil, SH, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan yang jika dilanggar maka akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
3. Menurut Achmad Ali, sumber hukum ialah tempat di mana kita dapat menentukan hukum. Namun perlu kita ketahui bahwa adakalanya sumber hukum juga sekaligus merupakan hukum.

Meskipun definisi sumber hukum yang di kemukakan oleh para ahli hukum berbeda-beda, namun dapat kita simpulkan bahwa Sumber Hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya aturan-aturan yang memiliki kekuatan dan bersifat memaksa, yang apabila kita langgar maka akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.

6. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia

Adapun sumber-sumber hukum tata negara di Indonesia, yaitu :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- Peraturan Menteri dan Surat Keputusan Menteri
- Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Yurisprudensi
- Hukum Tidak Tertulis
- Hukum Internasional
- Keputusan Tata Usaha Negara (administratieve beschikking)
- Doktrin
- Traktat

8. Pengertian Asas Hukum

Adapun pengertian asas hukum menurut para ahli hukum, berikut beberapa di antaranya :

- Menurut Bellefroid, Asas Hukum merupakan suatu norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang dimana oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.
- Menurut P. Scholten, Asas Hukum ialah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, akan tetapi yang tidak boleh tidak harus ada (harus ada).
- Menurut Van Eikemma Hommes, Asas Hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi perlu dianggap sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk – petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dalam pembentukan hukum praktis itu perlu berorientasi pada asas-asas hukum atau dengan kata lain, pengertian asas hukum yaitu dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkrit atau nyata melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak.

9. Fungsi asas hukum

Adapun beberapa Fungsi asas hukum, yaitu ;

- Fungsi Mengatasi Konflik

Fungsi mengatasi konflik merupakan bagian penting dalam asas hukum, contohnya jika suatu peraturan walikota bertentangan dengan peraturan-peraturan gubernur maka yang diberlakukan ialah peraturan gubernur.

- Fungsi Rekayasa Sosial
Jika dilihat dari fungsi hukum yakni sebagai alat perekayasa sosial, maka dalam suatu asas hukum juga dapat di fungsikan sebagai alat perekayasa sosial.
- Fungsi Taat Asas (Konsisten)
Fungsi taat asas ialah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam suatu sistem hukum.

10. Macam-Macam Asas

Adapun macam-macam asas, yaitu ;

- Asas Pancasila
Asas Pancasila merupakan prinsip dasar dan utama dalam kehidupan negara Indonesia.
- Asas Negara Hukum
Asas Negara Hukum menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum.
- Asas Negara Kesatuan
Asas Negara Kesatuan ialah prinsip dasar dalam suatu negara, bahwa negara tersebut merupakan negara berdaulat sebagai satu kesatuan.
- Asas Kedaulatan Rakyat
Asas Kedaulatan Rakyat merupakan prinsip negara yang dimana kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
- Asas Pembagian Kekuasaan
Asas Pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki suatu prinsip yaitu membagi kekuasaan di setiap daerah.

11. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, terbagi atas ;

- Sistem Pra Kemerdekaan, yang dimana terbagi lagi atas 2 bagian yaitu masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang.
Pada masa penjajahan Belanda Indonesia dikenal dengan sebutan Hindia Belanda dikarenakan telah dianggap menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Adapun peraturan perundang-undangan yang di berlakukan ialah UUD Kerajaan Belanda dan terbagi lagi atas 2 bagian, yaitu : Indonesia merupakan bagian dari kerajaan Belanda dan pemegang pemerintahan tertinggi atas Indonesia adalah Ratu Belanda dan Gubernur Jenderal atau Pemeerintahan Umum.

Pada masa penjajahan Jepang, Jepang memiliki kedudukan sebagai penguasa pendudukan, dan menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia kemudian dari situ

terbentuklah BPUPKI dan PPKI yaitu Badan Pemerintah Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini Jepang tidak diperbolehkan untuk mengubah susunan hukum Hindia-Belanda, dan Kekuasaan tertinggi ada pada Bala Tentara Jepang bukan lagi pada Pemerintahan Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, terjadi 3 kali sidang BPUPKI yakni, yang pertama pada tanggal 1 Mei sampai pada tanggal 1 Juni tahun 1945 pada tahap yang pertama ini yang dibahas ialah mengenai Rancangan Dasar Negara. Kemudian pada tahap kedua yakni pada tanggal 1 Juli sampai pada tanggal 17 Juli tahun 1945 pada tahap yang kedua ini, yang dibahas ialah mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar. Adapun PPKI, Sebelum sidang PPKI dilaksanakan Jepang mengumumkan deklarasi bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu.

- Sistem Pasca Kemerdekaan

Pada masa ini, terbagi menjadi 3 bagian yaitu : Pertama, Pasca pemberlakuan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada masa ini yang menjadi titik tolak Hukum Tata Negara Indonesia ialah Proklamasi. Proklamasi di sini merupakan norma pertama dari tata hukum Indonesia yang dimana terbagi lagi atas 3 bagian, yang pertama Menetapkan UUD NRI, yang kedua Penetapan Soekarno dan Moh.Hatta, yang ketiga yaitu pembentukan Departemen oleh Presiden.

Kedua, Republik Indonesia Serikat

Pada bagian ini, terdapat 2 poin utama yaitu Perundingan Linggarjati dan Konferensi Meja Bundar. Adapun hasil dari perundingan Linggarjati yaitu yang pertama, Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto, kemudian yang kedua yaitu Belanda dan Indonesia bekerjasama dalam membentuk RIS. Kemudian pada Konferensi Meja Bundar yang menjadi inti pembahasan ialah berubahnya status negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat.

Ketiga, UUDS 1950

Pada bagian ini memiliki 3 poin inti, yaitu : yang pertama, Presiden beserta Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat. Yang kedua, Para Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga, Presiden berhak untuk membubarkan DPR.

- Orde Lama

Pada masa ini, yang menjadi poin inti ialah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dimana isinya terbagi atas 3, yaitu : Diberlakukannya kembali UUD 1945, Konstituante dibubarkan, dan yang ketiga ialah pembentukan MPRS dan DPAS.

Pada masa ini, terjadi yang namanya pemberontakan G30s PKI dan terjadi banyak penyimpangan atas dekrit presiden 5 Juli 1950.

- Orde Baru

Pada masa ini, terdapat beberapa poin penting, yaitu : Pada Orde Baru ini, untuk pertama kalinya telah dilaksanakan pemilihan umum yaitu pada tanggal 3 Juli tahun 1971 sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang No.15 tahun 1969. Pada masa ini juga banyak terjadi kerusuhan dikarenakan pada masa ini pelaksanaan ekonominya

tidak berbasis ekonomi kerakyatan oleh karena hal itulah yang menjadi sebab terjadinya kerusuhan.

12. Konstitusi sebagai objek kajian Hukum Tata Negara

Konstitusi, pada dasarnya konstitusi telah memiliki berbagai istilah dari para ahli hukum, namun secara umum konstitusi berasal dari kata *constituante* atau UUD, dalam sebuah norma pada sistem politik dan hukum yang biasanya di kodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Istilah konstitusi disini yang di maksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi memuat suatu peraturan pokok yang fundamental untuk membentuk suatu negara. Maka dapat disimpulkan bahwa konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan dalam suatu negara yang berupa kumpulan peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Istilah konstitusi sendiri mempunyai 2 pengertian yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Adapun konstitusi dalam arti luas, yaitu konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar baik yang tertulis, tidak tertulis maupun campuran dari kedua-duanya. Adapun dalam arti sempit atau terbatas, konstitusi merupakan piagam dasar ataupun Undang-Undang Dasar yang merupakan suatu dokumen lengkap yang memuat peraturan dasar dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar RI 1945. Adapun macam-macam konstitusi : yang pertama Konstitusi Absolut, yang kedua Konstitusi Relatif, yang ketiga Konstitusi Positif, yang keempat Konstitusi Ideal. Konstitusi dan Konvensi memiliki keterkaitan dikarenakan keduanya merupakan sumber hukum dan jika Konstitusi tidak dijadikan sebagai sumber hukum maka akan terjadi ketidakaturan dalam suatu penyelenggaraan negara.

13. Organ dan Fungsi Kekuasaan Negara

Adapun fungsi kekuasaan negara telah banyak ahli hukum yang telah mengemukakan, berikut beberapa diantaranya :

- John Locke

John Locke membagi atas 3 fungsi kekuasaan negara, yaitu yang pertama ialah Fungsi Legislatif yang dimana dalam fungsi legislatif ini terdapat poin inti yaitu membuat peraturan. Kemudian yang kedua yaitu Fungsi Eksekutif, yang dimana poin inti pada bagian ini ialah melaksanakan peraturan dan juga Yudikatif yang mengawasi pelaksanaan peraturan. Adapun yang ketiga yaitu Fungsi Federatif yakni yang mengurus semua urusan luar negeri dan juga urusan perang serta perdamaian.

- Montesquieu

Adapun fungsi kekuasaan negara menurut Montesquieu, yang terbagi lagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ialah Fungsi Legislatif dimana pada bagian ini kekuasaan legislatif memiliki fungsi untuk membuat Undang-Undang. Kemudian yang kedua yaitu Kekuasaan Eksekutif yang pada bagian ini Montesquieu mengutamakan tindakan pada bidang politik luar negeri. Adapun yang ketiga, yaitu Kekuasaan yudikatif yang memiliki tugas untuk mengadili pelaku pelanggaran Undang-Undang.

Dari dua pendapat diatas yaitu pendapat John Locke dan pendapat Montesquieu terdapat beberapa perbedaan pendapat, Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif atau kekuasaan pengadilan itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Adapun pembagian kekuasaan, pembagian kekuasaan ini dilakukan guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan agar tidak berpusat hanya pada satu orang atau satu Lembaga tertentu saja. Oleh Karena itu, pembagian kekuasaan ini dibagi atas 3, yakni Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif. Selain itu, ada pula pemisahan kekuasaan yaitu berarti kekuasaan dalam suatu negara terpisah menjadi beberapa bagian baik organ maupun fungsinya dan setiap Lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam UUD 1945. Pembagian Kekuasaan ini terdiri lagi atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Adapun pembagian kekuasaan secara horizontal, pada bagian ini, terbagi atas 6 bagian yaitu :

1. Kekuasaan Konstitutif (MPR)
Untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang yang dimiliki oleh MPR. Dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 .
2. Kekuasaan Eksekutif (Presiden)
Untuk menjalankan Undang-Undang dan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Hal ini telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
3. Kekuasaan Legislatif (DPR)
Untuk membentuk Undang-Undang, sesuai pada pasal 20 ayat (1) UUD 1945.
4. Kekuasaan Yudikatif (MA dan MK)
Pada bagian ini diselenggarakan peradilan agar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini terdapat pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
5. Kekuasaan Eksaminatif (BPK)
Yakni yang berhubungan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan juga penanggungjawaban terkait keuangan negara. Hal ini terdapat pada pasal 23 E ayat (1) UUD 1945.
6. Kekuasaan Moneter (BI)
Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur, menjaga dan memelihara sistem pembayaran agar nilai rupiah tetap stabil, hal ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Hal ini terdapat pada pasal 23D UUD 1945.

Adapun pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal telah di atur dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang dimana pembagian kekuasaan secara vertikal ini dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten maupun kota. Di Indonesia, pembagian kekuasaan secara vertikal ini berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat.